

Berita	: Potensi Pajak Kendaraan Belum Digali Secara Optimal
Entitas / Cakupan	: Kota Bandung
Sumber / Hal	: Pikiran Rakyat/Hal.2
Edisi	: Senin, 30 April 2018

## Potensi Pajak Kendaraan Belum Digali Secara Optimal

### BANDUNG, (PR).-

Pemerintah Kota Bandung menerima bagi hasil pajak kendaraan bermotor sekitar Rp 500 miliar dari hasil perolehan tahun 2017. Jika seluruh pemilik kendaraan tertib pajak dan tertib daftar ulang, Kota Bandung masih menyimpan potensi hingga Rp 900 miliar per tahun.

Ketua Tim Pendukung Keberhasilan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Kota Bandung Kamalia Purbani menuturkan, salah satu permasalahan pajak kendaraan yaitu tingginya jumlah kendaraan tidak daftar ulang serta kendaraan belum daftar ulang. Dari catatan tahun 2017, terdapat 451.312 unit kendaraan belum melaksanakan kewajiban membayar pajaknya.

"Kesadaran masyarakat membayar pajak daerah yang belum terbentuk. Ini juga karena masih ada anggapan bahwa pajak merupakan beban ba-



ARMIN ABDUL JABBAR/PR

*PENGENDARA sepeda motor melintas di antara deretan mobil yang terparkir di Jalan Macan, Kota Bandung, Minggu (29/4/2018). Pemerintah Kota Bandung meminta setiap camat mendata warga agar melakukan balik nama kendaraan.\**

gi masyarakat. Tentunya ini merupakan tantangan yang perlu diselesaikan bersama antara pemerintah provinsi dan pemerintah kota," kata Kamalia, belum lama ini.

Pemerintah Kota Bandung telah melakukan upaya pengoptimalan pajak kendaraan bermotor. Salah satunya dengan kolaborasi seluruh perangkat daerah dan aparat kewilayahan

sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, yakni perumusan anggaran dan kebijakan serta sosialisasi.

"Kami sudah menyusun rencana aksi yang terdiri atas sosialisasi, pendataan kendaraan bermotor, penerapan kebijakan wajib daftar, e-Samsat bagi ASN Pemkot Bandung, hingga pembuatan kebijakan perizinan di Kota Bandung yang dikaitkan dengan pajak kendaraan bermotor," tutur Kamalia yang juga Asisten I Pemerintahan dan Kesra Kota Bandung itu.

Bagi hasil pajak kendaraan bermotor 2017 yang diterima Pemkot Bandung sekitar Rp 500 miliar itu berasal dari bagi hasil pajak kendaraan bermotor sebesar 60 persen untuk provinsi dan 40 persen untuk kabupaten atau kota. Kamalia berharap adanya kerja sama antara Pemprov Jabar dan Pemkot Bandung dapat meng-

untungkan kedua belah pihak. Sementara itu, Penjabat Sementara Wali Kota Bandung Muhamad Solihin mengatakan, potensi pajak kendaraan bermotor di Kota Bandung mencapai Rp 800 miliar hingga Rp 900 miliar. Potensi tersebut bisa tercapai jika para pemilik kendaraan bermotor memiliki kesadaran untuk membayar pajak tepat waktu.

"Ini potensinya besar. Jika ada pemilik kendaraan bermotor yang tidak daftar ulang, bisa diingatkan, didata, dan dilaporkan. Karena biasanya yang tidak mendaftarkan itu telat bayar pajak sehingga merasa takut," ujar Solihin.

Ia pun memerintahkan kepada seluruh aparat sipil negara, camat, dan lurah untuk mengingatkan serta mengajak masyarakat pemilik kendaraan sepeda motor membayar pajak tepat waktu. (Muhammad Fikry Mauludy)\*\*\*